



**KONVERGENSI PDRB PER KAPITA
ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2012-2017**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Dwi Octaviana

7111415025

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang
panitia ujian skripsi pada :


Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Pembimbing



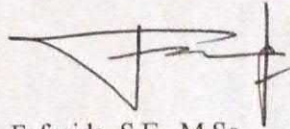

Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.
NIP. 198701222014041001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juli 2019

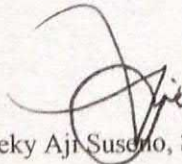
Penguji I



Fafurida, S.E., M.Sc.

NIP. 198502162008122004

Penguji II



Dedy Aji Susanto, S.E., M.Si.

NIP. 197612032003121004

Penguji III



Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

NIP. 198701222014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D

NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Octaviana

NIM : 7111415025

Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 09 Oktober 1997

Alamat : Jekulo Karang RT 04 RW 07 Jekulo Kudus

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 19 Juni 2019



Dwi Octaviana

NIM 7111415025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Lihatlah ke bawah untuk belajar bersyukur
dan lihatlah ke atas untuk belajar menjadi lebih baik”

Persembahan

1. Skripsi ini dipersembahkan kepada: Bapak Suwadi dan Ibu Siti Suwarni yang selalu memberi dukungan selama ini;
2. Almamater Unnes

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konvergensi PDRB Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2017”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Suwadi, Ibu Siti Suwarni dan Rina Agustiani yang selalu memberikan dukungan serta doa;
2. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Heri Yanto M. B. A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi;
4. Fafurida, S.E., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah mendorong dan mengerahkan selama menempuh studi;

5. Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, bantuan, nasihat, dukungan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Fafurida, S.E., M.Sc. dan Bapak Deyk Aji Suseno, S.E., M.Si. selaku dosen penguji I dan dosen penguji II yang telah memberikan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
7. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam hal administrasi penelitian ini;
8. Sahabat, serta teman – teman dari Ekonomi Pembangunan 2015 yang bersedia membantu dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.

Akhir kata, penulis berhadap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, bagi almamater, dan para pembaca umumnya.

Semarang, 19 Juni 2019

Dwi Octaviana
7111415025

SARI

Octaviana, Dwi. 2019. “Konvergensi PDRB Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2017”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

Kata Kunci: Konvergensi, Ketimpangan Pendapatan, PDRB Per Kapita.

Indikator kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB per kapita. Selama kurun waktu 2012-2017, capaian PDRB per kapita tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah bervariasi dan mengalami tren yang meningkat namun daerah satu dengan daerah lainnya mengalami ketimpangan PDRB per kapita. Daerah dengan capaian PDRB per kapita rendah dituntut untuk tumbuh lebih cepat dibanding dengan daerah dengan capaian PDRB per kapita yang tinggi agar dapat mencapai pertumbuhan perekonomian yang mapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konvergensi sigma dan beta PDRB per kapita, menganalisis pengaruh PDRB per kapita awal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), modal manusia, investasi fisik dan infrastruktur terhadap pertumbuhan PDRB per kapita.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2012-2017, yang diperoleh dari beberapa instansi pemerintah antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan instansi lainnya yang terkait dalam penelitian ini. Perhitungan konvergensi sigma menggunakan standar deviasi dari log PDRB per kapita antar kabupaten/kota, dan perhitungan konvergensi beta absolut dan beta kondisional menggunakan analisis data panel dengan pendekatan *fixed effect model* dengan metode *Generalized Least Square* (GLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi konvergensi sigma PDRB per kapita artinya terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2012-2017. Namun, tidak terjadi konvergensi beta absolut maupun beta kondisional artinya daerah berkembang tidak mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan daerah kaya. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa konvergensi beta merupakan syarat perlu dari konvergensi sigma, namun bukan menjadi syarat cukup bagi konvergensi sigma. Modal manusia, investasi fisik serta infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dengan besaran pengaruh masing-masing sebesar 0.167202, 0.241167 dan 0.0077865. Sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Hal tersebut terjadi karena kabupaten/kota di Jawa Tengah masih bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pusat sehingga belum memaksimalkan potensi di daerahnya.

ABSTRACT

Octaviana, Dwi. 2019. "Convergence Of Per Capita GRDP Among Regions In Central Java, 2012-2017". Final Project. Development Economics. Faculty of Economics, Semarang State University. Advisor: Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.

Keywords : Convergence, Income Inequality, Per Capita GRDP.

Economic indicators of community welfare can be seen from the growth of GRDP per capita. During the period of 2012-2017, the achievement of per capita GRDP per district / city in Central Java varied and tended to increase, but the regions with other regions experienced per capita GRDP inequality. Regions with low per capita GRDP are required to grow faster than regions with high per capita GRDP to achieve steady growth. This study aims to identify the sigma and beta convergence of GRDP per capita, analyze the effect of initial per capita GRDP, Local Revenue (PAD), human capital, physical investment and infrastructure on the growth of GRDP per capita.

The data used in this study are secondary data from 2012-2017, which were obtained from several government institutions including the Central Statistics Agency (BPS), the Directorate of Financial Balance General (DGTK) and other institutions involved in this study. Calculation of sigma convergence using standard deviation from per capita GRDP log between districts / cities, and absolute beta and beta conditional convergence calculations using panel data analysis with fixed effect model approach with Generalized Least Square (GLS) method.

The results of this study indicate that there is a convergence of sigma GRDP per capita, meaning that there is income inequality between districts / cities in Central Java in 2012-2017. However, there is no absolute beta convergence or conditional beta, meaning that developing regions do not experience faster growth than rich regions. Previous research has suggested that beta convergence is a necessary condition of sigma convergence, but is not a sufficient condition for sigma convergence. Human capital, physical investment and infrastructure have a positive effect on GDP growth per capita with the influence each of 0.167202, 0.241167 and 0.0077865. While PAD does not affect the growth of GDP per capita. This happens because districts / cities in Central Java still depend on balancing funds originating from the center so they have not maximized the potential in their regions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
SARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	17
1.3 Cakupan Masalah.....	18
1.4 Rumusan Penelitian.....	18
1.5 Tujuan Penelitian.....	19
1.6 Manfaat Penelitian.....	20
1.6.1 Manfaat Teoritis	20
1.6.2 Manfaat Praktis	21
1.7 Orisinalitas Penelitian	21

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
2.1 Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>).....	22
2.1.1 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	22
2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.1.3 Ketimpangan Pendapatan.....	25
2.1.4 Konsep Konvergensi.....	27
2.1.4.1 Konvergensi Sigma.....	28
2.1.4.2 Konvergensi Beta.....	29
2.2 Kajian Variabel Penelitian.....	31
2.2.1 Pengaruh PAD terhadap PDRB Per Kapita.....	31
2.2.2 Pengaruh Modal Manusia terhadap PDRB Per Kapita.....	32
2.2.3 Pengaruh Investasi Fisik terhadap PDRB Per Kapita.....	33
2.2.4 Pengaruh Infrastruktur terhadap PDRB Per Kapita.....	34
2.3 Penelitian Terdahulu.....	35
2.4 Kerangka Berpikir.....	43
2.5 Hipotesis Penelitian.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Jenis dan Desain Penelitian.....	47
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.4 Variabel Penelitian.....	49
3.4.1 Definisi Variabel Penelitian.....	49
3.4.2 Definisi Operasional Variabel.....	50

3.5 Metode Analisis Data	51
3.5.1 Analisis Konvergensi Sigma.....	51
3.5.2 Metode Regresi Data Panel.....	52
3.5.2.1 Analisis Konvergensi Beta Absolut.....	56
3.5.2.2 Analisis Konvergensi Beta Kondisional.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Variabel.....	60
4.1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita.....	60
4.1.2 Perkembangan PAD	63
4.1.3 Perkembangan Modal Manusia	65
4.1.4 Perkembangan Investasi Fisik	68
4.1.5 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur	71
4.2 Konvergensi Sigma	73
4.3 Pemilihan Model.....	75
4.4 Konvergensi Beta	77
4.4.1 Konvergensi Beta Absolut.....	78
4.4.2 Konvergensi Beta Kondisional.....	83
4.5 Pembahasan.....	90
4.5.1 Konvergensi Sigma.....	90
4.5.2 Konvergensi Beta Absolut.....	91
4.5.3 Konvergensi Beta Kondisional.....	92
4.5.4 Pengaruh PAD terhadap PDRB Per Kapita	93
4.5.5 Pengaruh Modal Manusia terhadap PDRB Per Kapita.....	95

4.5.6 Pengaruh Investasi Fisik terhadap PDRB Per Kapita	96
4.5.7 Pengaruh Infrastruktur terhadap PDRB Per Kapita	97
BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Simpulan.....	98
5.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi Wilayah/Pulau terhadap Pembentukan PDB.....	4
Tabel 1.2 Koefisien Gini Provinsi di Pulau Jawa.....	6
Tabel 1.3 Realisasi PAD Kab/Kota Jawa Tengah.....	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Data dan Sumber Data.....	48
Tabel 4.1 PDRB Per Kapita Kab/Kota Jawa Tengah.....	61
Tabel 4.2 PMTB Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	69
Tabel 4.3 Konvergensi Sigma	74
Tabel 4.4 Hasil <i>Chow Test</i> Konvergensi Absolut	75
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman Konvergensi Absolut.....	76
Tabel 4.6 Hasil <i>Chow Test</i> Konvergensi Kondisional.....	76
Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman Konvergensi Kondisional	77
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Regresi Konvergensi Absolut	79
Tabel 4.9 Efek Individu Konvergensi Absolut	81
Tabel 4.10 Hasil Estimasi Regresi Konvergensi Kondisional.....	83
Tabel 4.11 Efek Individu Konvergensi Kondisional.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi di Pulau Jawa	5
Gambar 1.2 PDRB ADHK Kab/Kota di Jawa Tengah	8
Gambar 1.3 PDRB Per Kapita Kab/Kota di Jawa Tengah.....	9
Gambar 1.4 Pertumbuhan PMTB Jawa Tengah.....	15
Gambar 2.1 Kurva U Terbalik Kuznet.....	26
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	45
Gambar 4.1 PAD Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah	64
Gambar 4.2 Rata-Rata Lama Sekolah Kab/Kota Jawa Tengah	66
Gambar 4.3 Panjang Jalan Kategori Baik Kab/Kota Jawa Tengah.....	72
Gambar 4.4 Konvergensi Sigma	74
Gambar 4.5 Pemetaan Konvergensi Absolut di Jawa Tengah	82
Gambar 4.6 Pemetaan Konvergensi Kondisional di Jawa Tengah	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PDRB per kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	
Tahun 2012-2017	106
Lampiran 2 Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	
Tahun 2012-2017	108
Lampiran 3 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	
Tahun 2012-2017	110
Lampiran 4 PMTB Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2017	111
Lampiran 5 Panjang Jalan Kategori Baik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	
Tahun 2012-2017	113
Lampiran 6 Nilai Logaritma PDRB per kapita Kabupaten/Kota dan	
Standar Deviasi Tahun 2012-2017.....	114
Lampiran 7 Uji Chow Konvergensi Absolut	116
Lampiran 8 Uji Hausman Konvergensi Absolut.....	117
Lampiran 9 Perhitungan Konvergensi Absolut <i>Fixed Effect Model</i>	118
Lampiran 10 Uji Chow Konvergensi kondisional.....	120
Lampiran 11 Uji Hausman Konvergensi Kondisional	121
Lampiran 12 Perhitungan Konvergensi Kondisional <i>Fixed Effect Model</i>	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai perubahan dalam struktur ekonomi suatu daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat. Ukuran pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan rendahnya ketimpangan pendapatan antar penduduk (Kuncoro M. , 2004). Salah satu tujuan dari pertumbuhan ekonomi ialah pembangunan ekonomi secara berkelanjutan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju, sehingga daerah miskin maupun berkembang dan dapat mensejajarkan perekonomiannya dengan daerah maju baik dalam hal pendapatan maupun indikator ekonomi lainnya yang pada akhirnya ketimpangan antar daerah semakin berkurang.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peningkatan *output* produksi barang dan jasa yang dihasilkan di daerah tersebut dan diukur menggunakan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat PDRB daerah tersebut. Dasar dari aktivitas perekonomian merupakan proses mengkombinasikan penggunaan faktor produksi berupa modal dan tenaga kerja untuk menghasilkan

barang dan jasa, sehingga adanya aktivitas perekonomian tersebut terdapat aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

Ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah yaitu pendapatan riil atau PDRB per kapita di daerah tersebut. Namun tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bukan berarti tiap daerah di wilayah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang sama karena sumber daya yang dimiliki tiap daerah berbeda-beda. Teori pertumbuhan Harrod-Domar menjelaskan apabila dilihat dari faktor modal, *output* per kapita dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif artinya kenaikan pada pendapatan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi juga. Keduanya saling berkaitan, namun untuk melihat pertumbuhan ekonomi, *output* per kapita tidaklah cukup. Pertumbuhan ekonomi haruslah berasal dari dalam daerah itu sendiri. Artinya *output* per kapita yang dihasilkan dari suatu daerah tidak bersumber pada banyaknya bantuan yang diterima, melainkan dari sumber daya atau potensi daerah yang dikembangkan secara mandiri. Dalam lingkup antar daerah, *output* per kapita yang berasal dari dalam daerah itu sendiri dapat dilihat dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Purwandari (2016) peningkatan PAD mampu meningkatkan investasi modal. Adanya kenaikan investasi modal dapat mempermudah melakukan aktivitas perekonomian karena adanya investasi tersebut dapat memperbaiki maupun menambah sarana dan prasarana pendukung kegiatan perekonomian yang dapat dilihat dari infrastruktur yang tersedia, sehingga dapat memperlancar

pendistribusian barang serta akses yang mudah bagi pelaku ekonomi yang akhirnya akan meningkatkan output dan produktivitas.

Sedangkan dari sisi tenaga kerja, secara kualitas dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah, karena semakin tinggi jenjang sekolah yang ditamatkan (semakin lama bersekolah) maka pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki juga tinggi sehingga produktivitas juga meningkat. Perbedaan faktor modal dan tenaga kerja di tiap daerah yang dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga *output* yang dihasilkan yang diukur dengan PDRB juga berbeda di tiap daerah. Menurut pendapat Kuznet bahwa distribusi pendapatan akan cenderung mengalami ketimpangan yang tinggi sampai pada titik tertentu pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Namun, pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik atau distribusi pendapatan mengalami pemerataan. Kemudian Teori Kuznet ini lebih dikenal dengan hipotesis U terbalik Kuznet karena perubahan distribusi pendapatan dengan ukuran koefisien gini dan pertumbuhan PDRB per kapita akan menggambarkan kurva berbentuk U terbalik.

Berdasarkan publikasi data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2012 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah pelemahan ekonomi global yang masih berlanjut karena meningkatnya harga minyak dunia yang terus meningkat dan lesunya pasar ekspor terutama untuk tujuan ke negara-negara Eropa yang masih lesu perekonomiannya, kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2012 masih tumbuh cukup kuat, terutama didorong oleh permintaan domestik yaitu konsumsi rumah tangga dan investasi. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Berita Resmi Statistik

tahun 2018, Pulau Jawa merupakan pulau dengan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di Indonesia. Lebih dari setengah PDB Indonesia merupakan kontribusi dari Pulau Jawa. Tabel 1.1 menampilkan pertumbuhan kontribusi pulau terhadap pembentukan PDB Indonesia dari tahun 2012-2017.

Tabel 1.1 Kontribusi Wilayah/Pulau terhadap Pembentukan PDB (persen)

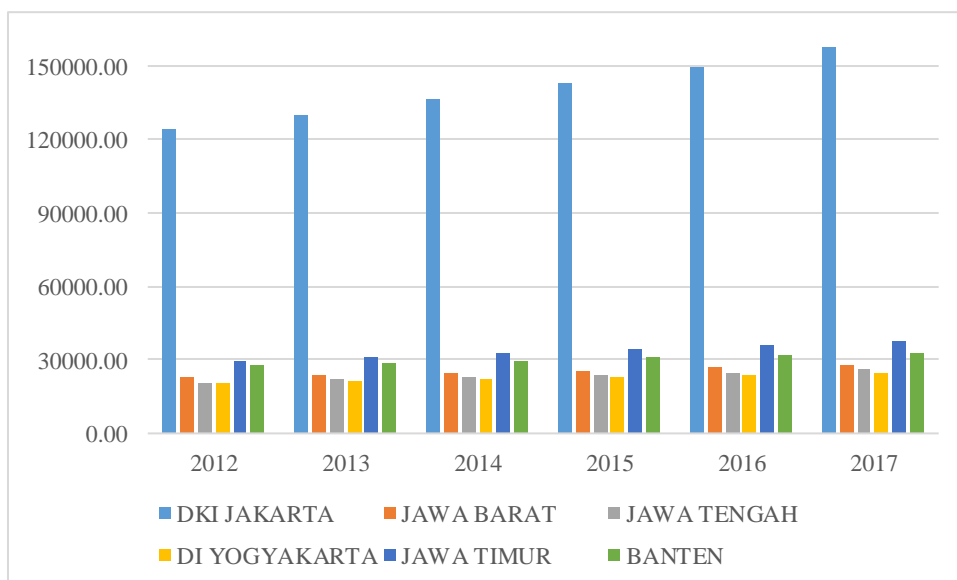
No	Pulau	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Sumatera	23.77	23.81	23.63	22.21	22.02	21.66
2.	Jawa	57.62	57.99	58.51	58.29	58.40	58.49
3.	Bali dan Nusa Tenggara	2.51	2.53	2.50	3.06	3.18	3.11
4.	Kalimantan	9.30	8.67	8.21	8.15	7.72	8.20
5.	Sulawesi	4.74	4.82	4.97	5.92	6.15	6.11
6.	Maluku dan Papua	2.06	2.18	2.18	2.37	2.53	2.43

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tahun 2012 peranan Pulau Jawa terhadap PDB sebesar 57.62 persen dan terus meningkat hingga tahun 2017 menjadi 58.49 persen. Pulau Sumatera menjadi pulau dengan kontribusi PDB terbesar setelah Pulau Jawa, sedangkan pulau yang memiliki kontribusi kecil dalam pembentukan PDB yaitu Pulau Maluku dan Pulau Papua, meskipun dari tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan namun kontribusi terhadap PDB tidak lebih dari 2.43 persen. Lebih jauh lagi, terdapat ketimpangan antar daerah yang terjadi di Pulau Jawa dilihat dari *output* per kapita atau PDRB per kapita dari masing-masing provinsi di Pulau Jawa.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi berkembang di Pulau Jawa dengan pendapatan rata-rata terendah kedua di bawah Provinsi DI Yogyakarta . Sebanyak 34,26 juta jiwa tinggal di Jawa Tengah, jumlah tersebut seratus kali lebih banyak dibandingkan penduduk Provinsi DI Yogyakarta yang berjumlah 3,76 juta jiwa. Pendapatan rata-rata merupakan cerminan dari PDRB per kapita untuk

melihat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan data publikasi BPS tahun 2018 PDRB per kapita Jawa Tengah sebesar Rp. 26.097.670,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1 Perkembangan PDRB per Kapita Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2012-2017

Gambar 1.1 menunjukkan PDRB per kapita provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2012-2017 mengalami peningkatan. Rata-rata PDRB per kapita di Pulau Jawa tahun 2012 sebesar Rp 40.892.960,- angka tersebut terus naik sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita tiap tahunnya, menjadi Rp 51.154.33,- pada tahun 2017. Provinsi yang memiliki PDRB per kapita paling tinggi dan berada di atas rata-rata adalah Kota Jakarta hal ini merupakan sesuatu yang wajar dikarenakan Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia yang mana kegiatan perekonomian berpusat pada daerah tersebut. PDRB per kapita paling rendah yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan terendah kedua yaitu Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2012 hingga 2017 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan,

kenaikan tersebut ditunjang oleh peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tiap tahunnya. Namun peningkatan UMK tersebut tidak memberi peningkatan terhadap PDRB per kapita.

Provinsi Jawa Tengah tidak menempati posisi tertinggi dan menempati posisi kedua terendah dalam PDRB per kapitanya. Meskipun begitu, terdapat ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan besaran nilai koefisien gini, Jawa Tengah memiliki nilai koefisien gini yang berfluktuatif namun cenderung menurun dari tahun 2012 hingga 2017 serta memiliki koefisien gini paling besar diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Koefisien gini merupakan salah satu indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien gini berkisar antara nol (0) hingga 1, apabila nilai koefisien gini mendekati angka 1 maka tidak terjadi pemerataan pendapatan atau mengalami ketimpangan pendapatan yang tinggi begitupun sebaliknya apabila nilai koefisien gini mendekati 0 maka distribusi pendapatan semakin merata.

Tabel 1.2 Koefisien Gini Provinsi di Pulau Jawa

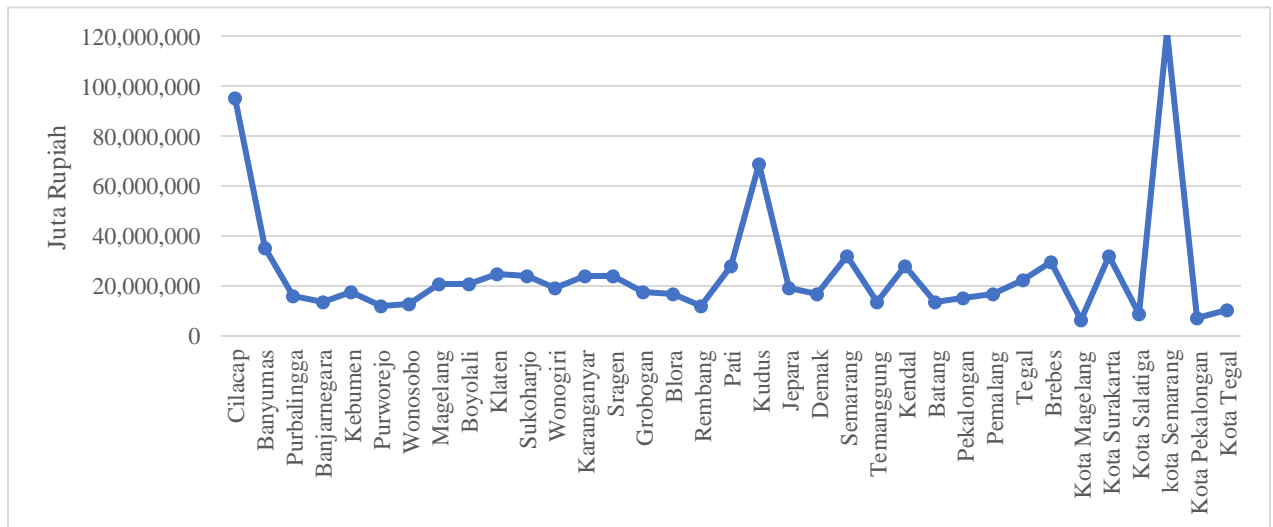
No	Provinsi	Tahun		
		2012	2015	2017
1	DKI Jakarta	0,437	0,421	0,409
2	Jawa Barat	0,422	0,426	0,393
3	Jawa Tengah	0,449	0,420	0,440
4	DI Yogyakarta	0,372	0,382	0,365
5	Jawa Timur	0,362	0,403	0,415
6	Banten	0,384	0,386	0,379

Sumber: BPS Jawa Tengah

Tabel 1.2 menunjukkan besaran nilai koefisien gini perdesaan dan perkotaan tahun 2012, 2015 dan 2017 pada tiap provinsi di Pulau Jawa. Nilai koefisien gini provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuatif namun cenderung

menurun. Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki koefisien gini terbesar dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, meskipun sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami penurunan namun masih menjadi provinsi yang mengalami ketimpangan dalam pendapatannya. Pada tahun 2017 nilai koefisien gini Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,440 meskipun belum menunjukkan ketimpangan yang tinggi akan tetapi jika dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai koefisien gini paling tinggi. DKI Jakarta dengan PDRB per kapita tertinggi di Pulau Jawa memiliki koefisien gini sebesar 0,409 yaitu pada urutan ketiga dari enam provinsi di Pulau Jawa. Artinya bahwa distribusi pendapatan Provinsi DKI lebih merata dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki PDRB per kapita dengan urutan kelima dari enam provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan data publikasi dari Bank Indonesia (2017), Jawa Tengah merupakan provinsi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun di kawasan Pulau Jawa di bawah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Akan tetapi, pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah merupakan yang terendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di kawasan Pulau Jawa (BI, 2017). Jika dilihat dari tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah tingkat ketimpangan pendapatan daerah (PDRB) masih relatif tinggi. Identifikasi awal dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah.



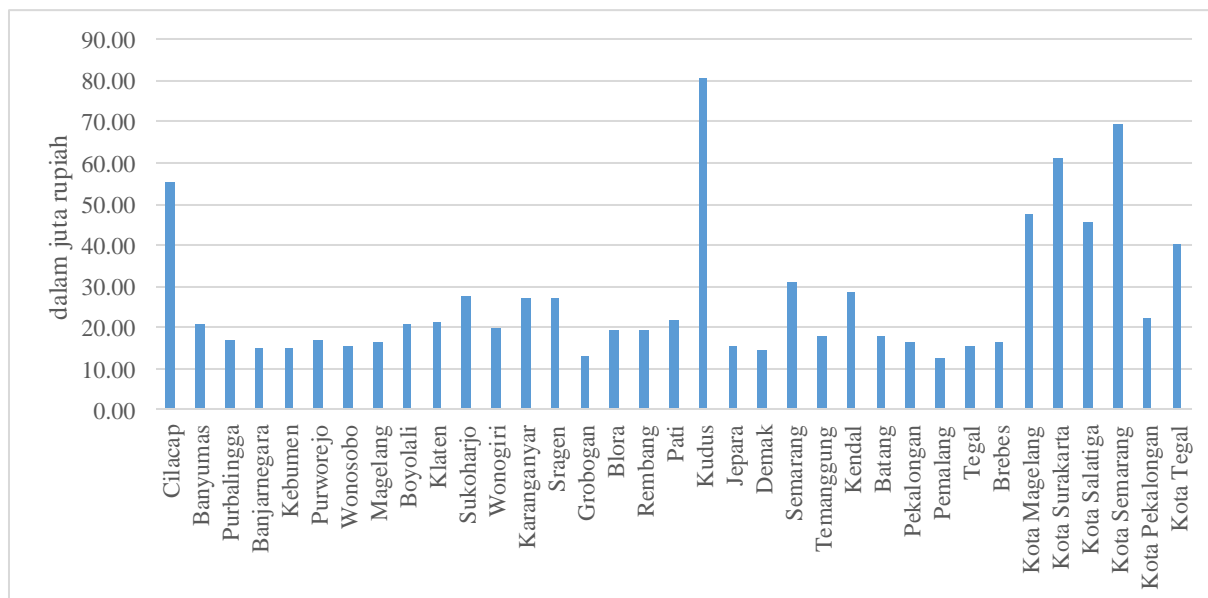
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 PDRB ADHK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan gambar 1.2 perbedaan PDRB Kota Semarang dan Kota Magelang sangat tinggi. Kota Semarang memiliki PDRB 24 kali lebih tinggi dibandingkan PDRB Kota Magelang. Atau jika dibuat rata-rata, PDRB ADHK rata-rata di Jawa Tengah sebesar Rp 25.444.050,44 juta sedangkan PDRB Kota Semarang Rp 122.000.440,38 juta. PDRB Kota Semarang empat kali lebih besar dibandingkan PDRB rata-rata Jawa Tengah. Sedangkan Kota Magelang perlu meningkatkan pendapatan daerahnya (PDRB) sebesar lima kali lipat untuk bisa berada di atas PDRB rata-rata Jawa Tengah. Bahkan kabupaten/kota yang tergolong 10 PDRB terkecil hanya berkisar 5-11 persen dari PDRB Kota Semarang.

PDRB kurang mampu untuk mencerminkan kesejahteraan secara nyata pada tiap penduduknya, oleh karena itu ukuran yang tepat digunakan untuk melihat kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu daerah dapat dilihat berdasarkan pendapatan rata-rata atau PDRB per kapita (Iswanto, 2015). PDRB per kapita yaitu pendapatan rata-rata yang diperoleh penduduk suatu daerah pada periode tertentu.

PDRB per kapita dapat dihitung dengan cara membagi PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan jumlah penduduk pada daerah dan tahun yang sama sehingga diperoleh pendapatan perkapita riil.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 PBRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan gambar 1.3 PDRB per kapita paling tinggi di Kabupaten Kudus, artinya Kabupaten Kudus memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Bahkan Kota Semarang yang memiliki PDRB ADHK paling tinggi memiliki PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kudus sehingga ada kemungkinan bahwa produktivitas Kota Semarang lebih rendah daripada Kabupaten Kudus karena tingginya pendapatan daerah Kota Semarang disertai juga dengan tingginya jumlah penduduknya, sedangkan Kota Magelang yang memiliki PDRB ADHK paling rendah masuk dalam lima besar PDRB per kapita paling tinggi, lebih besar dari pada Kabupaten Banyumas yang memiliki PDRB ADHK tertinggi urutan ke 4. Jadi

kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Magelang lebih tinggi dari pada dari pada Kabupaten Banyumas. Jadi untuk melihat suatu daerah maju atau tidaknya tidak dapat hanya dilihat dari PDRB ADHK tapi juga dilihat pendapatan rata-rata penduduk atau PDRB per kapita daerah tersebut.

Jumlah penduduk juga memiliki peran pada besaran PDRB per kapita, tingginya jumlah penduduk akan menyebabkan PDRB per kapita suatu daerah akan rendah jika pertumbuhan jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan nasionalnya. Daerah maju yang mempunyai PDRB per kapita tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang kecil dan konstan karena sudah mencapai kondisi *full employment*. Sedangkan daerah berkembang akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena belum berada dalam kondisi *full employment* (Kuncoro M. , 2013).

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan bahwa fokus perekonomian yaitu tingkat pendapatan yang stabil berdasarkan kesempatan kerja penuh serta penggunaan faktor produksi yang tersedia. Salah satu ekonom teori neoklasik yaitu Solow, berpendapat bahwa apabila sudah mencapai kondisi *full employment*, daerah maju akan sulit untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya, sedangkan untuk daerah berkembang dapat menaikkan perekonomiannya sampai pada kondisi mapan dengan menambahkan modal melalui investasi. Solow juga memperkirakan adanya tingkat pengembalian yang menurun (*deminishing return*) sehingga akan menyebabkan tingkat pertumbuhan yang semakin menurun untuk daerah maju yang pada akhirnya perekonomian di negara berkembang akan menciptakan proses konvergensi. Schmitt dan Strake

(2011) menyatakan bahwa pada variabel tertentu, konvergensi akan menyebabkan kondisi suatu daerah dengan daerah lain akan mirip.

Konsep konvergensi ada dua, pertama terjadinya peurunan ketimpangan pendapatan yang dilihat melalui dispersi PDRB per kapita. Dispersi PDRB per kapita dihitung menggunakan standar deviasi dari logaritma PDRB per kapita, konvergensi ini lebih di kenal dengan menggunakan istilah konvergensi sigma (*sigma convergence*). Kedua yaitu adanya kecenderungan daerah-daerah berkembang tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah kaya, konvergensi ini disebut dengan konvergensi beta (*beta convergence*). Konvergensi beta terjadi apabila pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan karena pertumbuhan ekonomi bergerak ke posisi awal.

Mankiw (2004), menjelaskan bahwa konvergensi terjadi apabila perekonomian daerah miskin dengan pendapatan rendah akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah maju yang pendapatannya tinggi. Konvergensi beta terbagi lagi menjadi dua yaitu absolut dan kondisional, perbedaan dari keduanya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PDRB. Konvergensi absolut mengasumsikan bahwa terjadinya konvergensi di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor PDRB per kapita tahun sebelumnya dan faktor-faktor lain dianggap tetap, sedangkan pertumbuhan PDRB per kapita pada pertumbuhan ekonomi dipengaruhi juga oleh PDRB per kapita awal namun faktor-faktor tertentu dianggap juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tentang konvergensi pertama kali dilakukan oleh Barro dan Sala i Martin (1992), Barro menyatakan bahwa adanya hubungan negatif antara tingkat

pendapatan awal dengan pertumbuhan ekonomi selama periode tertentu, pendapatan yang dimaksud ialah pendapatan rata-rata atau PDRB per kapita. Barro juga menyatakan bahwa konvergensi merupakan cara untuk mengejar (*catch up*) ketertinggalan daerah miskin terhadap daerah maju. Studi konvergensi tentang PDRB per kapita juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia, antara lain Wibisono (2003), Prasasti (2006), Kharisma (2013), Wahyunadi (2015), Wau (2015) dan Purwandari (2016) hasil penelitian mereka menunjukkan adanya proses konvergensi yang terjadi di Indonesia dengan kecepatan yang berbeda-beda. Perbedaan dalam distribusi pendapatan antar daerah akan mengakibatkan ketimpangan antara daerah kaya dan daerah miskin.

Perbedaan daerah kaya dan miskin tersebut dapat tercermin dari pendapatan daerah yang diperoleh masing-masing daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut BPS (2018), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang berasal dari sumber-sumber pendapatan berupa pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan milik daerah dan dipisahkan serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pertumbuhan realisasi PAD tiap daerah dari tahun 2012 hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan. Pertumbuhan realisasi PAD kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017 ditampilkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2012, 2015, 2017 (juta rupiah)

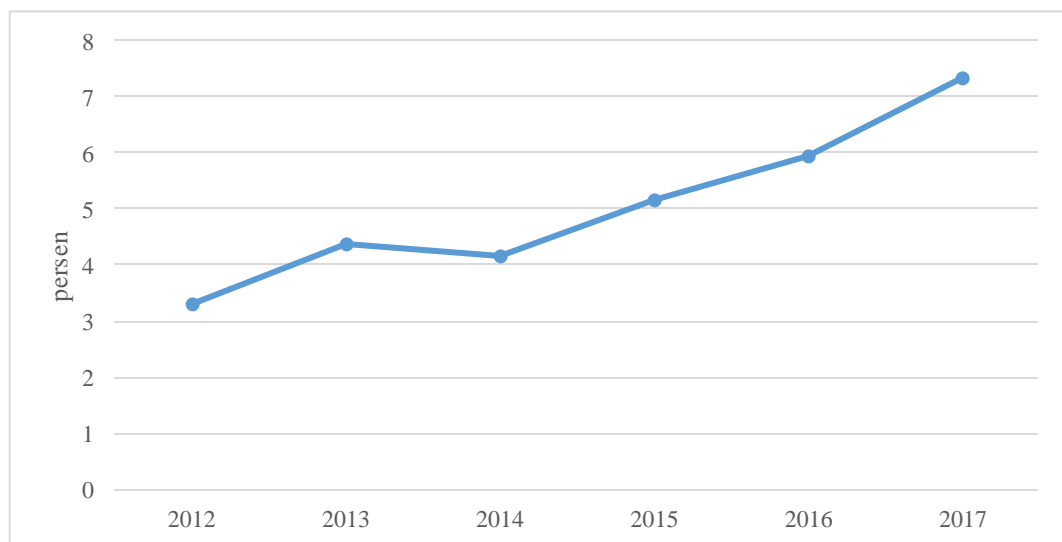
No	Kabupaten/Kota	TAHUN		
		2012	2015	2017
1	Cilacap	196.673,44	409.845,66	648.091,38
2	Banyumas	242.106,51	502.281,35	619.701,63
3	Purbalingga	103.755,70	215.622,05	355.859,00
4	Banjarnegara	94.271,47	180.561,07	297.485,38
5	Kebumen	102.374,37	245.159,26	443.608,86
6	Purworejo	98.262,00	233.934,13	298.606,49
7	Wonosobo	82.335,30	182.607,63	228.017,47
8	Magelang	123.722,78	261.569,09	403.561,24
9	Boyolali	127.725,21	260.633,64	388.014,90
10	Klaten	84.755,83	190.622,67	371.718,44
11	Sukoharjo	164.954,32	313.947,49	464.567,41
12	Wonogiri	100.037,19	211.208,60	333.840,43
13	Karanganyar	116.706,89	255.445,55	415.142,56
14	Sragen	127.695,84	267.711,82	404.569,40
15	Grobogan	105.463,32	272.718,44	440.456,24
16	Blora	81.987,01	156.402,92	280.042,02
17	Rembang	103.304,51	193.122,76	300.319,28
18	Pati	163.733,67	310.063,64	449.821,35
19	Kudus	121.017,03	255.284,09	366.031,20
20	Jepara	129.076,57	270.251,58	325.530,35
21	Demak	105.363,37	254.324,49	309.612,41
22	Semarang	156.104,01	278.851,90	417.417,85
23	Temanggung	78.514,69	212.498,14	308.466,75
24	Kendal	120.162,14	239.564,40	404.978,61
25	Batang	84.720,05	179.721,27	219.807,13
26	Pekalongan	114.793,37	251.558,97	305.394,30
27	Pemalang	97.951,21	230.435,21	425.893,27
28	Tegal	118.741,62	304.000,97	375.531,17
29	Brebes	101.806,86	301.953,71	523.660,77
30	Kota Magelang	91.314,60	186.677,41	233.557,71
31	Kota Surakarta	231.672,10	372.798,43	527.544,22
32	Kota Salatiga	77.798,87	167.010,56	220.243,36
33	Kota Semarang	779.616,54	1.201.581,78	1.791.886,38
34	Kota Pekalongan	91.205,79	152.044,60	192.002,87
35	Kota Tegal	156.663,03	271.601,41	306.830,66

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)

Berdasarkan tabel 1.3 sejak tahun 2012 hingga 2017 realisasi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan. Artinya semakin banyak kegiatan operasional maupun kegiatan perekonomian yang dapat didanai oleh pemerintah daerah. Realisasi PAD paling tinggi yaitu Kota Semarang, terlihat dari berbagai fasilitas lengkap yang dimiliki Kota Semarang seperti fasilitas transportasi publik, pendidikan, hiburan dan lain sebagainya. Pada tahun 2017 realisasi PAD Kota Semarang mencapai Rp 1.791.886,38 juta, PAD terbesar kedua ialah Kabupaten Cilacap dengan besaran yang jauh berbeda dengan PAD Kota Semarang yaitu Rp 648.091,38. Sedangkan PAD kabupaten/kota lainnya tidak lebih besar dari PAD Kabupaten Cilacap atau berkisar antara Rp 200.000 juta hingga Rp 500.000 juta. Menurut Bank Indonesia, pajak merupakan penyumbang terbesar sumber Pendapatan Asli Daerah, lebih dari setengah PAD merupakan penerimaan yang diterima dari pajak yang dibayarkan masyarakat baik pajak pribadi maupun pajak usaha.

Sebagian dana realisasi PAD tersebut akan dialokasikan untuk memperbaiki maupun menambah sarana dan prasarana pembelajaran untuk menyediakan tenaga kerja ahli dalam masing-masing bidangnya. Selain menyediakan sarana prasarana pembelajaran, realisasi PAD juga digunakan untuk menyediakan prasarana infrastruktur yang dapat dilihat dari infrastruktur yang tersedia. Sejalan dengan membaiknya infrastruktur akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya sehingga investasi fisik juga meningkat. Menurut BPS (2018), investasi fisik tercermin pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB memiliki keterkaitan yang erat dengan aset tetap dalam proses produksi. Secara garis besar

PMTB mencakup bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak dan barang modal lainnya. PMTB merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai yang lebih dari satu tahun dan dalam pemakaiannya mengalami penyusutan. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa adanya penyusutan yang menggambarkan adanya penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi selama periode tertentu.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 1.4 Pertumbuhan PMTB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017

Berdasarkan data publikasi Bank Indonesia tahun 2017 dalam Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah, secara keseluruhan PMTB kabupaten/kota di Jawa Tengah terus meningkat. Gambar 1.4 menampilkan kenaikan PMTB Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 hingga tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa investasi di Jawa Tengah terus bertambah tiap tahunnya. Peningkatan investasi fisik tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 7,35 persen, hal tersebut didorong oleh selesainya proyek infrastruktur pemerintah. Selain itu, investasi swasta juga

mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya perusahaan swasta yang membangun perusahaan baru serta relokasi industri ke Provinsi Jawa Tengah, sehingga mendorong peningkatan investasi berupa bangunan pabrik maupun pembelian mesin dan perlengkapan.

Besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah sejalan dengan perbaikan infrastruktur serta meningkatnya investasi fisik seharusnya dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antar daerahnya. Namun ketimpangan dalam distribusi pendapatan per kapita antar kabupaten/kota yang disebabkan oleh perbedaan dalam faktor modal dapat memunculkan daerah kaya dan daerah miskin. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik telah dijelaskan adanya konsep tingkat pengembalian yang menurun (*diminishing return*) dimana pada daerah kaya atau maju yang sudah mengalami kondisi *full employment* maka pertumbuhan ekonominya akan menurun sedangkan daerah miskin atau berkembang yang belum mencapai kondisi *full employment* akan memaksimalkan perekonomiannya sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

Namun masing-masing daerah memiliki banyak perbedaan yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi berbeda-beda. Daerah maju dengan pendapatan tinggi akan terus menggali dan mengembangkan teknologi dan inovasi baru sehingga perekonomiannya terus mengalami peningkatan. Hal tersebut akan mempersulit daerah berkembang yang baru memulai untuk mengejar perekonomian daerah maju. Masih tingginya tingkat ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu perlu

dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dengan mengambil judul “Konvergensi PDRB Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2017”.

1.2 Identifikasi Masalah

Distribusi PDRB per kapita tiap daerah yang belum merata mengakibatkan ketimpangan pada pembangunan ekonomi antar daerah yang mana proses pembangunan terjadi melalui pembentukan modal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan asumsi Teori Neoklasik yaitu *diminishing of return* atau tambahan modal yang semakin menurun, maka tingkat pertumbuhan ekonomi daerah miskin akan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah kaya sehingga dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi antar daerah dalam kondisi mapan (*steady state*) akan tercapai. Karena adanya proses konvergensi (*catch up*), pertumbuhan ekonomi daerah miskin akan lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi daerah kaya. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi berkembang di Pulau Jawa yang memiliki PDRB per kapita meningkat tiap tahunnya namun memiliki nilai koefisien gini tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

Tingginya pendapatan asli daerah yang diterima Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan perbaikan infrastruktur yang tersedia serta meningkatnya investasi fisik belum mampu mendorong perekonomian Jawa Tengah ke tahap *steady state*, karena masih terkendala adanya distribusi pendapatan yang belum merata antar kabupaten/kota di Jawa Tengah. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui perekonomian daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada daerah maju

atau tidak, sehingga bersama-sama mampu membawa kabupaten/kota di Jawa Tengah pada kondisi perekonomian yang mapan.

1.3 Cakupan Masalah

Agar penelitian dapat fokus dan mendalam maka permasalahan dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan. Cakupan atau batasan masalah dalam penelitian ini hanya berkaitan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2017 dan variabel penelitian yang digunakan yaitu PDRB per kapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), modal manusia, investasi fisik serta infrastruktur.

1.4 Rumusan Masalah

Setiap daerah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhannya baik di daerah maju maupun di daerah berkembang. Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian kecil dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan sulit dicapai jika pembangunan di daerah belum terpenuhi karena beberapa permasalahan salah satunya distribusi pendapatan antar daerah yang belum merata sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan daerah satu dengan daerah lainnya.

Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah maka daerah yang masuk dalam kategori miskin perlu melakukan pengejaran (konvergensi) agar

sejajar dengan daerah maju. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian antara lain:

1. Apakah terjadi konvergensi sigma dalam pertumbuhan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017?
2. Apakah terjadi konvergensi beta absolut dalam pertumbuhan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017?
3. Apakah terjadi konvergensi beta kondisional dalam pertumbuhan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017?
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017?
5. Bagaimana pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017?
6. Bagaimana pengaruh investasi fisik terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017?
7. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi konvergensi sigma dalam pertumbuhan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017

2. Mengidentifikasi konvergensi beta absolut dalam pertumbuhan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017
3. Mengidentifikasi konvergensi beta kondisional dalam pertumbuhan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017
4. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Jawa Tengah tahun 2012-2017
5. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Jawa Tengah tahun 2012-2017
6. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh investasi fisik terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Jawa Tengah tahun 2012-2017
7. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Jawa Tengah tahun 2012-2017

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang teori ekonomi. Dapat dijadikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tentang konvergensi PDRB per kapita di Jawa Tengah

2. Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan informasi dan gambaran kepada masyarakat maupun peneliti lain sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan permasalahan yang hampir sama

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai variabel yang diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dan mampu mempercepat proses konvergensi PDRB per kapita sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan serta membantu dalam perumusan kebijakan agar lebih tepat sasaran.

1.7 Orisinilitas Penelitian

Orisinilitas merupakan kebaruan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun orisinilitas dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu Kharisma (2013), Wahyunadi (2015) dan Purwandari (2016). Tidak semua variabel dalam penelitian sebelumnya digunakan dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penggabungan dari variabel penelitian sebelumnya yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dan dapat menyebabkan proses konvergensi
2. Objek penelitian ini terdiri dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rentang waktu yang digunakan yaitu tahun 2012-2017

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Pertumbuhan ekonomi selalu dikaitkan dengan pendapatan nasional, secara konseptual nilai dari pendapatan nasional dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat daerah. Nilai PDB dihitung menurut harga yang berlaku dan harga tetap. PDB yang dihitung menurut harga tetap diperoleh dengan menghitung harga-harga yang berlaku di tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar untuk perhitungan tahun sekarang yang merupakan cerminan dari pendapatan nasional riil. Sehingga apabila menghitung PDB menurut harga tetap, pendapatan nasional riil dari tahun ke tahun akan menggambarkan perkembangan produksi barang dan jasa yang sebenarnya dalam perekonomian. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan mengenai perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dalam suatu tahun tertentu dan menggambarkan sampai dimana barang dan jasa telah bertambah pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas

ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran (*income per-capita*) dalam jangka panjang (Subandi, 2011). Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat karena keberhasilan dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun namun juga perlu diperhatikan perubahan-perubahan lainnya dari kegiatan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006).

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari PDB per kapita yaitu pendapatan rata-rata yang diperoleh penduduk di suatu negara pada periode tertentu. PDB per kapita dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan pembangunan ekonomi dan membandingkan tingkat kemakmuran yang dicapai di suatu negara. Jika pertumbuhan pendapatan negara lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tingkat penduduk maka PDB per kapita akan rendah atau mengalami penurunan. Karena PDB per kapita diperoleh dengan cara membagi pendapatan negara atau Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan dengan jumlah penduduk suatu negara pada periode tertentu.

Pembangunan ekonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

Beberapa sasaran fundamental pembangunan yang berusaha dicapai oleh beberapa daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan PDRB per kapita, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan (Kuncoro, 2004).

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Fokus utama teori pertumbuhan neoklasik yaitu tingkat pendapatan yang stabil berdasarkan kesempatan kerja penuh serta penggunaan kapasitas produksi yang tersedia. Faktor produksi menurut Cobb-Douglass yaitu terdiri dari modal dan tenaga kerja. Menurut Harrod (1947) dan Domar (1957), investasi dan modal manusia memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat menciptakan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Oleh karena itu selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar (Jhingan, 2014).

Namun untuk tetap mencapai equilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh (*full employment*), baik pendapatan nyata maupun output harus meningkat pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Jika tidak maka setiap perbedaan dari pendapatan nyata atau output akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau menganggur. Dalam proses pertumbuhan ekonomi disamping meningkatkan akumulasi modal fisik, pertumbuhan modal pada manusia juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Modal manusia berkaitan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber daya yang kreatif dan produktif.

Kelompok daerah berkembang sering dihadapkan pada dua masalah tenaga kerja, yaitu kurangnya keterampilan yang dimiliki dan adanya *surplus* tenaga kerja. Modal fisik lebih produktif jika diimbangi dengan modal manusia yang memadai. Menurut Todaro (2000), rendahnya produktivitas suatu daerah disebabkan oleh daerah tersebut belum mampu memanfaatkan modal fisik secara maksimal karena mengimpor modal fisik secara besar-besaran namun tidak dapat mempercepat laju pertumbuhan sebab sumber daya manusia yang dimiliki masih terbelakang. Beberapa ekonom sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi haruslah berasal dari dalam daerah itu sendiri, bukan berasal dari bantuan-bantuan dari daerah lain yang hanya bersifat sementara. Oleh karena itu setiap daerah harus mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara mandiri.

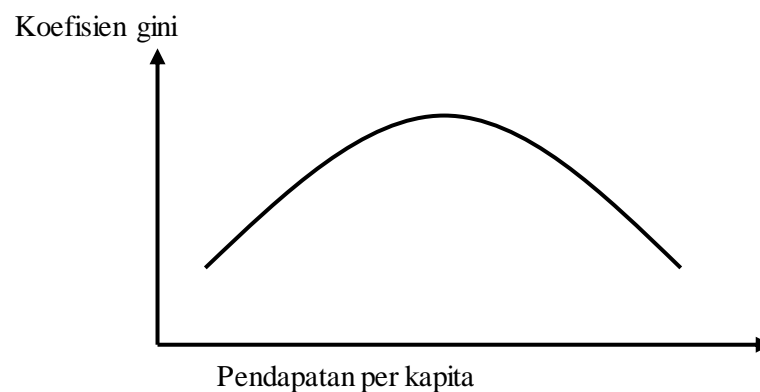
Selain meningkatkan perekonomian melalui faktor modal dan sumber daya yang dimiliki, tingkat ketersediaan infrastruktur juga merupakan faktor penting dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Samuelson & Nordhaus, 2004). Berdasarkan pada teori pertumbuhan neoklasik, Solow (1956) menyatakan bahwa perekonomian berbagai daerah akan bertemu (*converge*). Solow juga mengasumsikan adanya tambahan hasil yang semakin berkurang dalam penggunaan kombinasi input.

2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Kesejahteraan ekonomi masyarakat memiliki hubungan negatif dengan tingkat ketimpangan dan memiliki hubungan positif dengan PDRB per kapita.

Ketimpangan pendapatan rata-rata yang tinggi dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi (Todaro & Smith, 2006). Todaro (2006) juga menjelaskan bahwa penduduk yang berpendapatan rendah akan memiliki tingkat tabungan cenderung rendah karena tingkat tabungan marginal yang tinggi hanya dimiliki oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi. Meskipun mereka dapat menabung dengan jumlah yang besar namun mereka biasanya menabung dalam bagian yang lebih kecil dari pendapatan mereka bahkan lebih kecil dari pendapatan marginal mereka. Karena mereka lebih suka membelanjakan sebagian besar dari pendapatan mereka atau menyimpan kekayaan di luar negeri dalam bentuk pelarian modal.

Sedangkan penduduk yang berpenghasilan rendah pada umumnya mereka tidak akan menyediakan pendidikan yang memadai dan mengorbankan kualitas pendidikan bagi anak mereka yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin melebar.



Gambar 2.1. Kurva U terbalik Kuznet

Menurut Simon Kuznet pada tahap awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan akan mengalami ketimpangan yang tinggi namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan semakin merata. Kemudian pendapat

Kuznets ini disebut dengan kurva Kuznets “U-terbalik” karena perubahan longitudinal (*time-series*) dalam distribusi pendapatan seperti yang diukur. Pada awal pembangunan ekonomi ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dan kemudian membaik karena ada kaitannya dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural (Todaro & Smith, 2006). Karena kurva Kuznets dihasilkan oleh proses pertumbuhan yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan perkembangan perekonomian tradisional ke perekonomian modern di suatu daerah.

2.1.4 Konsep Konvergensi

Adanya perbedaan PDRB per kapita pada masing-masing daerah akan menimbulkan ketimpangan (*gap*) antar daerah miskin dengan daerah yang maju. Mankiw (2004) menjelaskan bahwa teori pertumbuhan neoklasik memprediksi bahwa daerah-daerah akan tumbuh pada tingkat yang sama dan perekonomian akan menunjukkan kondisi yang berbeda-beda ketika dalam proses menuju perekonomian yang mapan (*steady state*). Proses menuju perekonomian yang mapan tersebut dikenal dengan istilah konvergensi. Teori konvergensi merupakan pengembangan dari teori pertumbuhan Harrod-Domar dan Solow yang berdasar pada teori pertumbuhan neoklasik.

Dasar pemikiran teori konvergensi adalah faktor produksi dan cadangan modal sehingga dalam teori pertumbuhan neoklasik dijadikan sebagai faktor penentu perbedaan pendapatan antar daerah. Apabila suatu daerah mempunyai kesamaan fungsi produksi, maka daerah berkembang secara relatif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan daerah maju.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Wibisono (2003) spesifikasi pada model pertumbuhan Solow yaitu *diminishing returns to capital* yang akan menyebabkan tingkat pertumbuhan suatu perekonomian melambat seiring dengan semakin dekatnya jarak perekonomian ke tingkat modal per tenaga kerja. Kemudian Mankiw (2004) melineraliasi model Solow dan memperkenalkan tingkat pendapatan per kapita awal sebagai ukuran jarak terhadap *steady state*. Studi tentang konvergensi pertama kali dilakukan oleh Barro dan Sala-i-Martin (1992) untuk melihat konvergensi PDRB per kapita di negara bagian Amerika. Lalu diikuti oleh peneliti-peneliti lainnya termasuk di Indonesia.

Menurut Wibisono (2003) dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi terdapat dua pandangan tentang konvergensi, yang pertama menurut Barro (1984), Baumol (1986), DeLong (1988), Barro (1991) serta Barro dan Sala-i-Martin (1991, 1992, 1995) menjelaskan konvergensi terjadi ketika perekonomian miskin tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian kaya. Kedua, menurut Easterlin (1960), Borts dan Stein (1964), Streissler (1979), Barro (1984), Baumol (1986), Dowrick dan Nguyen (1989) serta Barro dan Sala-i-Martin (1991, 1992, 1995) menjelaskan konvergensi terjadi ketika dispersi yang diukur dengan standar deviasi dari log PDRB per kapita antar daerah semakin menurun. Oleh karena itu konvergensi dibagi menjadi dua antara lain:

2.1.4.1 Konvergensi Sigma

Konvergensi sigma menggambarkan tingkat dispersi atau penyebaran dari PDRB per kapita. Konvergensi sigma terjadi apabila dispersi PDRB per kapita yang

dihitung menggunakan standar deviasi dari logaritma PDRB per kapita antar daerah semakin menurun, apabila dispersi PDRB per kapita mengalami penurunan maka ketimpangan antar daerah cenderung berkurang. Konvergensi sigma konsisten dengan teori neoklasik yang menyatakan bahwa setiap daerah bergerak menuju satu level pertumbuhan ekonomi tertentu karena terjadi keseimbangan penguasaan faktor-faktor produksi antar daerah.

2.1.4.2. Konvergensi Beta

Konvergensi beta bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan PDRB per kapita dengan PDRB per kapita awal. Apabila hubungan tersebut negatif, maka daerah yang memiliki PDRB per kapita tinggi pada periode awal akan memiliki pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan daerah dengan PDRB per kapita awal yang rendah, sehingga dalam jangka panjang semua daerah akan memiliki tingkat pertumbuhan yang sama. Koefisien konvergensi beta mengindikasikan seberapa cepat *output* per tenaga kerja sebuah perekonomian mendekati *steady state*-nya. Menurut Tajerin (2013), dari sudut pandang teoritis, analisis konvergensi beta hanyalah analisis deskriptif dan sama sekali tidak berbicara tentang mekanisme konvergensi tersebut. Meskipun demikian analisis konvergensi beta merupakan uji langsung terhadap hipotesis teori neoklasik dengan asumsinya tentang *diminishing returns to capital*. Konvergensi beta dibagi lagi menjadi dua yaitu:

1) Konvergensi Absolut

Konvergensi absolut merupakan hubungan antara pertumbuhan PDRB per kapita dengan PDRB per kapita awal tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, karena faktor lain diasumsikan sama sehingga ke depannya terjadi penyamaan PDRB per kapita dalam suatu wilayah. Persamaan konvergensi absolut sebagai berikut (Wibisono, 2003):

$$\log \frac{\left(\frac{Y_{i,T}}{Y_{i,0}}\right)}{T} = b_0 - b_1 \log(Y_{i,0}) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana i menunjukkan waktu, T dan 0 interval waktu observasi serta $Y_{i,T}$ dan $Y_{i,0}$ menunjukkan PDRB awal dan akhir pada suatu daerah.

2) Konvergensi Kondisional

Konvergensi kondisional merupakan hubungan antara pertumbuhan PDRB per kapita dengan PDRB per kapita awal dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita. Persamaan konvergensi kondisional adalah sebagai berikut (Wibisono, 2003):

$$\log \left(\frac{Y_{i,T}}{Y_{i,0}}\right) / T = b_0 - b_1 \log Y_{i,0} + \varepsilon_{i,t} \dots \dots \dots (2)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa i menunjukkan waktu, T dan 0 interval waktu observasi serta $Y_{i,T}$ dan $Y_{i,0}$ menunjukkan pendapatan awal dan akhir, b_0 menunjukkan *constant term* antara unit ekonomi dan $\varepsilon_{i,t}$ adalah *error term*. Menurut Barro (1992), tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita suatu daerah cenderung berhubungan terbalik dengan tingkat pendapatan awalnya, sehingga konvergensi akan terjadi jika terdapat

hubungan negatif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dengan pendapatan per kapita awal.

Kedua konvergensi tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa konvergensi sigma mempelajari perubahan distribusi pendapatan sepanjang waktu, sedangkan konvergensi beta mempelajari mobilitas pendapatan dalam distribusi yang sama. Meskipun berbeda namun keduanya saling berkaitan, karena konvergensi beta akan menghasilkan konvergensi sigma. Namun proses tersebut kadang terhapus oleh gangguan baru yang akan dapat merubah dispersi. Oleh karena itu konvergensi beta merupakan syarat perlu (*necessary condition*) namun bukan syarat yang cukup (*sufficient condition*) bagi terjadinya konvergensi sigma.

2.2 Kajian Variabel Penelitian

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan PDRB per Kapita

PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, semakin besar PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka semakin besar pula dana yang dapat dikeluarkan pemerintah daerah untuk dapat membiayai kegiatan operasional maupun kegiatan perekonomiannya (Purwandari, 2016). PAD juga dapat disebabkan karena meningkatnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari peningkatan pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat. Apabila masyarakat mengkonsumsi barang maupun menggunakan jasa maka akan ada pajak atau retribusi yang dibayar oleh masyarakat yang mana pajak dan retribusi tersebut

merupakan sumber dari pendapatan asli daerah. Hasil penelitian dari Purwandari (2016) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif serta signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita, sehingga peningkatan pada PAD akan sejalan dengan pertumbuhan PDRB per kapita.

2.2.2 Pengaruh Modal Manusia terhadap Pertumbuhan PDRB per Kapita

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu modal manusia (*human capital*). Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan sebagai kenaikan dari pendapatan daerah. Modal manusia merupakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki seseorang serta dapat mencerminkan kualitas dari seorang tenaga kerja. Menurut Kuncoro (2006) produktivitas harus didukung oleh investasi dan sumberdaya manusia yang memadai. Oleh karena itu modal manusia dapat berpengaruh pada produktivitas yang nantinya menentukan tingkat produksi domestik. Pendapatan daerah yang tinggi belum tentu mencerminkan bahwa masyarakatnya memiliki produktivitas yang tinggi pula apabila pendapatan rata-rata masyarakatnya rendah. Tanpa adanya keahlian dan keterampilan yang dimiliki maka peningkatan produktivitas tidak akan tercapai. Oleh karena itu modal manusia diperlukan sebagai syarat bagi pertumbuhan ekonomi baik di daerah maju maupun berkembang.

Kuncoro (2006) dalam bukunya juga menyimpulkan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, semakin tinggi pula jumlah anak yang mengenyam

pendidikan. Sedangkan indikator pendidikan dapat diukur dengan rata-rata lama sekolah (Todaro, 2000). Rata-rata pendidikan yang ditamatkan pada penelitian Kharisma (2013) dan Purwandari (2016) memiliki pengaruh positif serta signifikan karena sejalan dengan teori pertumbuhan yang menyatakan bahwa investasi dalam modal manusia berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan Gama (2010) dan Wahyunadi (2015) berdasarkan penelitian mereka berpendapat bahwa variabel modal manusia yang merupakan kualitas dari seorang tenaga kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita.

2.2.3 Pengaruh Investasi Fisik terhadap Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Investasi fisik merupakan syarat penting bagi pembangunan ekonomi, tanpa adanya investasi fisik maka kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan baik. Investasi fisik diperlukan dalam proses produksi dimana untuk membangun sebuah pabrik dan membayar biaya input produksi yang akan menghasilkan output berupa barang maupun jasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Jhingan (2014) menjelaskan Teori Harrod-Domar bahwa investasi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan pendapatan dan memperbesar kapasitas produksi dengan meningkatkan stok modal. Semakin banyaknya investasi maka semakin tinggi pula output yang dihasilkan dan meningkatkan pendapatan daerah. Tingginya pendapatan daerah tentu akan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat atau PDRB per kapita. Dengan

adanya investasi maka pertumbuhan pendapatan daerah akan meningkat sehingga PDRB per kapita yang diterima masyarakat juga meningkat. Hasil penelitian Kharisma (2013) serta Olarinde (2018) menunjukkan adanya pengaruh positif antara investasi fisik terhadap pertumbuhan PDRB per kapita maupun pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan besaran PDRB per kapita, artinya peningkatan investasi fisik akan meningkatkan PDRB per kapita dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Gama (2010) dan Wahyunadi (2015), berdasarkan penelitian mereka investasi fisik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB per kapita.

2.2.4 Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik karena didukung dengan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur dibagi menjadi beberapa kategori, pada kategori infrastruktur ekonomi terdapat infrastruktur berupa jalan. Kondisi jalan yang baik akan memperlancar dan mempercepat proses pendistribusian barang sampai di tangan konsumen, sehingga tidak membutuhkan waktu lama dan dapat menghemat biaya dalam pendistribusian barang yang nantinya dapat dialokasikan pada kegiatan ekonomi lainnya. Seperti yang diketahui mobilitas barang serta jasa dipengaruhi oleh jalan darat (Adha & Wahyunadi, 2015).

Permintaan akan barang juga meningkat karena kepuasan yang diperoleh konsumen sehingga perusahaan akan meningkatkan output produksinya dan tenaga

kerja akan banyak terserap serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat dan dalam jangka panjang akan terjadi kondisi *full employment*. Hasil penelitian Wahyunadi (2015) menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam proses percepatan konvergensi maupun mendorong pertumbuhan PDRB per kapita. Sedangkan Purwandari (2016) menyatakan bahwa infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB per kapita.

2.3 Penelitian Terdahulu

Jamal (2017) melakukan penelitian tentang konvergensi pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Pulau Sumatera. Tujuannya untuk mengetahui tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada tahun 2003 hingga tahun 2013. Alat analisis yang digunakan ialah *Ordinary Least Square (OLS)*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Hasil Uji Hausman menunjukkan model yang cocok untuk penelitiannya adalah *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB per kapita menunjukkan adanya proses divergen, artinya provinsi berkembang kurang mampu mengejar provinsi yang lebih maju.

Wahyunadi (2015) juga melakukan penelitian tentang konvergensi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan periode penelitian dari tahun 2003 hingga 2012. Alat analisis yang digunakan adalah *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Hasilnya menunjukkan adanya konvergensi dengan kecepatan yang berbeda

bergantung dengan model yang digunakan. Perbedaan tingkat teknologi antar wilayah memiliki pengaruh besar terhadap kecepatan konvergensi.

Jayanthakumaran dan Lee (2013) melakukan penelitian konvergensi pendapatan per kapita dengan membandingkan anggota pendiri ASEAN dan SAARC (meliputi Bangladesh, India, Nepal, Pakistan dan Srilangka) periode dari tahun 1976 hingga 2005. Hasilnya menunjukkan adanya konvergensi pendapatan di 5 negara pendiri asean sedangkan adanya divergen di SAARC.

Kharisma dan Saleh (2013) juga melakukan penelitian konvergensi pendapatan di 26 provinsi di Indonesia dengan tahun penelitian 1984 hingga 2008 dengan menggunakan data panel statis dan dinamis. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dispersi pendapatan diantaranya ialah krisis ekonomi yang terjadi, desentralisasi fiskal di Indonesia, dampak dari Bom Bali, dampak dari kenaikan harga BBM dan gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan adanya proses konvergensi di 26 provinsi di Indonesia dan esmitasi GMM menunjukkan bahwa provinsi di Pulau Jawa mengalami kecepatan konvergensi yang lebih dibandingkan provinsi di luar Pulau Jawa.

Purwandari (2016) melakukan penelitian konvergensi pendapatan di DI Yogyakarta periode tahun 2003-2014 dengan pendekatan model panel dinamis. Hasilnya tidak terjadi konvergensi sigma dan berdasarkan pendekatan model panel dinamis FD GMM untuk mengukur konvergensi beta absolut juga terjadi divergen namun setelah memasukkan variabel kontrol pemerintah terjadi konvergensi kondisional dengan kecepatan konvergensi 11,09 persen.

Wau (2015) juga melakukan penelitian tentang konvergensi beta di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Wau menguji konvergensi sigma dan konvergensi beta dengan menggunakan data PDRB per kapita tahun 1975-2013. Pengujian menggunakan konvergensi sigma menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi antar daerah kabupaten/kota dan antar kota di Sumatera Utara mengalami konvergensi sedangkan pembangunan antar kabupaten divergen atau tidak menunjukkan proses konvergensi. Untuk pengujian dengan konvergensi beta pembangunan ekonomi di Sumatera Utara mengalami proses konvergensi baik antar daerah kabupaten/kota, antar daerah kabupaten maupun antar kota.

Gama (2010) melakukan penelitian konvergensi PDRB antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan menggunakan indeks williamson dan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square /OLS*). Variabel yang diambil dalam penelitiannya antara lain PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), jumlah penduduk bekerja serta tingkat pendidikan yang ditamatkan minimal SMA. Berdasarkan analisis menggunakan indeks williamson, hasilnya menunjukkan terjadi ketimpangan yang tinggi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jika dilihat dari dispersi PDRB per kapita maka kabupaten/kota di Bali tidak mengalami konvergensi sigma (divergen). Hal ini juga didukung menggunakan uji konvergensi beta dimana hasilnya menunjukkan tidak terjadinya konvergensi beta (divergen). Peneliti membuat kesimpulan tersebut karena variabel-variabel yang digunakan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan PDRB per kapita.

Olarinde pada tahun 2018 melakukan penelitian tentang konvergensi di negara-negara Benua Afrika dengan waktu studi antara 1990 hingga 2014 dengan

menggunakan pendekatan data panel 50 negara di Afrika dengan menggunakan beberapa variabel serta menggunakan 5 model yang berbeda maka hasilnya yaitu tiap model menghasilkan tingkat signifikan yang berbeda-beda, namun Olarinde menarik kesimpulan bahwa tiga dari enam variabel yang digunakan tidak efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara Afrika. Variabel yang dimaksud antara lain sumber daya manusia, kebijakan moneter serta lembaga yang mengatur.

Tajerin (2013), melakukan penelitian konvergensi antar wilayah di Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu PDRB per kapita, investasi, modal manusia dan resultante dari jumlah pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi dan depresiasi kapital dengan menggunakan analisis regresi data panel dan membandingkan ketiga model data panel yaitu CEM, FEM dan REM. Hasilnya bahwa konvergensi kondisional menghasilkan proses konvergensi yang lebih cepat daripada konvergensi absolut.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, maka penelitian sebelumnya dirangkum dalam tabel 2.1 yang menjelaskan penelitian sebelumnya secara singkat agar mudah dipahami.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil
1	<p>Judul: Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Sumatera</p> <p>Penulis: Zulfa Putra, Abd. Jamal – 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB per kapita - PDRB atas dasar harga konstan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ordinary Least Square</i> (OLS) - <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan PDRB per kapita mengalami divergen - Pertumbuhan PDRB mengalami divergen

			- <i>Random Effect Model (REM)</i>	
2	<p>Judul: Disparitas Dan Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat</p> <p>Penulis: Rishan Adha, Wahyunadi – 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB per kapita riil 2003 – 2012 - Logaritma natural PDRB per kapita - Tingkat investasi manusia - Tingkat investasi fisik - Infrastruktur - Inflasi - Belanja pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Common Effect Model (CEM)</i> - <i>Fixed Effect Model</i> - <i>Random Effect Model</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketimpangan meningkat selama 2003 – 2012 - Pertumbuhan antar kabupaten/kota di NTB mengalami konvergensi
3	<p>Judul: Evidence On The Councergence Of Per Capita Income: A Comparison Of Founder Members Of The Association Of South East Asian Nation And The South Asian Association Of Regional Coopeation</p> <p>Penulis: Jayanthakumuran , Lee – 2013</p>	Relative income (PDRB per kapita)	- <i>Augmented Dickey Fuller (ADF)</i>	- Terdapat proses konvergensi di negara-negara ASEAN, namun tidak di negara-negara SAARC
4	<p>Judul: Convergence Of Income Among Provinces In Indonesia, 1984-2008: A Panel Data Approach</p> <p>Penulis:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB - Opennes - Education - Healt - Invesment - Net migraion 	<ul style="list-style-type: none"> - OLS - FEM - REM - <i>First Difference Generalize d Method</i> 	- Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dispersi pendapatan adalah dampak dari krisis

	Bayu Kharisma – 2013		<i>of Moment</i> (GMM) - System GMM	ekonomi, desentralisasi fiskal, bom Bali, kenaikan harga BBM dan gempa bumi di Yogyakarta - Selama periode penelitian terjadi konvergensi absolut dan kondisional di 26 provinsi di Indonesia
5	Judul: Pendekatan Model Panel Dinamis Dalam Kajian Konvergensi Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2014 Penulis: Agustina Purwandari – 2016	- PDRB per kapita riil - PAD - Infrastruktur - Angkatan kerja - Rata-rata lama sekolah	- Indeks williamson - First difference GMM - System GMM	- Berdasarkan indeks williamson terjadi ketimpangan yang tinggi - Tidak terjadi konvergensi sigma dan absolut (divergen) - Namun terjadi konvergensi kondisional yang dapat mengurangi ketimpangan 11,08% / tahun selama 6,25 tahun - Variabel yang dapat di kotrol pemerintah dapat menimbulkan konvergensi
6	Judul: Konvergensi Pembangunan	- PDRB per kapita	- OLS - FEM - REM	- Terdapat kovergensi sigma dan

	<p>Ekonomi Antar Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara</p> <p>Penulis: Taosige Wau – 2015</p>			<p>konvergensi beta absolut antar kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan kecepatan konvergensi yang berbeda-beda pada tiap daerah</p>
7	<p>Judul: Disparitas Dan Konvergensi PDRB per Kapita Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali</p> <p>Penulis: Ayu Savitri Gama – 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketimpangan (indeks williamson) - PMTB - Jumlah penduduk bekerja - Tingkat pendidikan yang ditamatkan minimal SMA 	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks williamson - OLS 	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin melebar di tambah lagi adanya peristiwa Bom Bali - Tidak menunjukkan proses konvergen
8	<p>Judul: African Growth Convergence: Role Of Institutions And Macroeconomics Poliecies</p> <p>Penulis: Muftau O. Olarinde – 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Income - Initial income - Investment in physical capital - Human capital - Labor - Factors that influence economic 	<ul style="list-style-type: none"> - Panel dynamic system - GMM 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ditemukan adanya konvergensi beta absolut di negara-negara benua afrika karena initial income yang tidak signifikan - Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa konvergensi kondisional yang lemah antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan

				negara-negara berpenghasilan rendah di wilayah tersebut.
9	<p>Judul: Tendensi Proses Konvergensi dan Penentu Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Utama di Indonesia, 1985-2010</p> <p>Penulis: Tajerin, Akhmad Fauzi, Dkk (2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PDRB per kapita - Investasi - Modal manusia - Resultante dari jumlah tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat perkembangan teknologi dan tingkat depresiasi 	<ul style="list-style-type: none"> - CEM - FEM - REM 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi konvergensi absolut dan kondisional antar wilayah pulau utama di Indonesia dengan kecepatan berbeda-beda - Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbukti dapat mempercepat proses konvergensi karena kecepatan konvergensi kondisional lebih cepat dari kecepatan konvergensi absolut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang digunakan. Berdasarkan tabel 2.1 beberapa peneliti menggunakan variabel yang hampir sama, oleh karena itu pada penelitian ini variabel yang digunakan merupakan penggabungan dari variabel yang diambil dari penelitian terdahulu yaitu PDRB per kapita, Pendapatan Asli Daerah (PAD), modal manusia, investasi fisik serta infrastruktur.

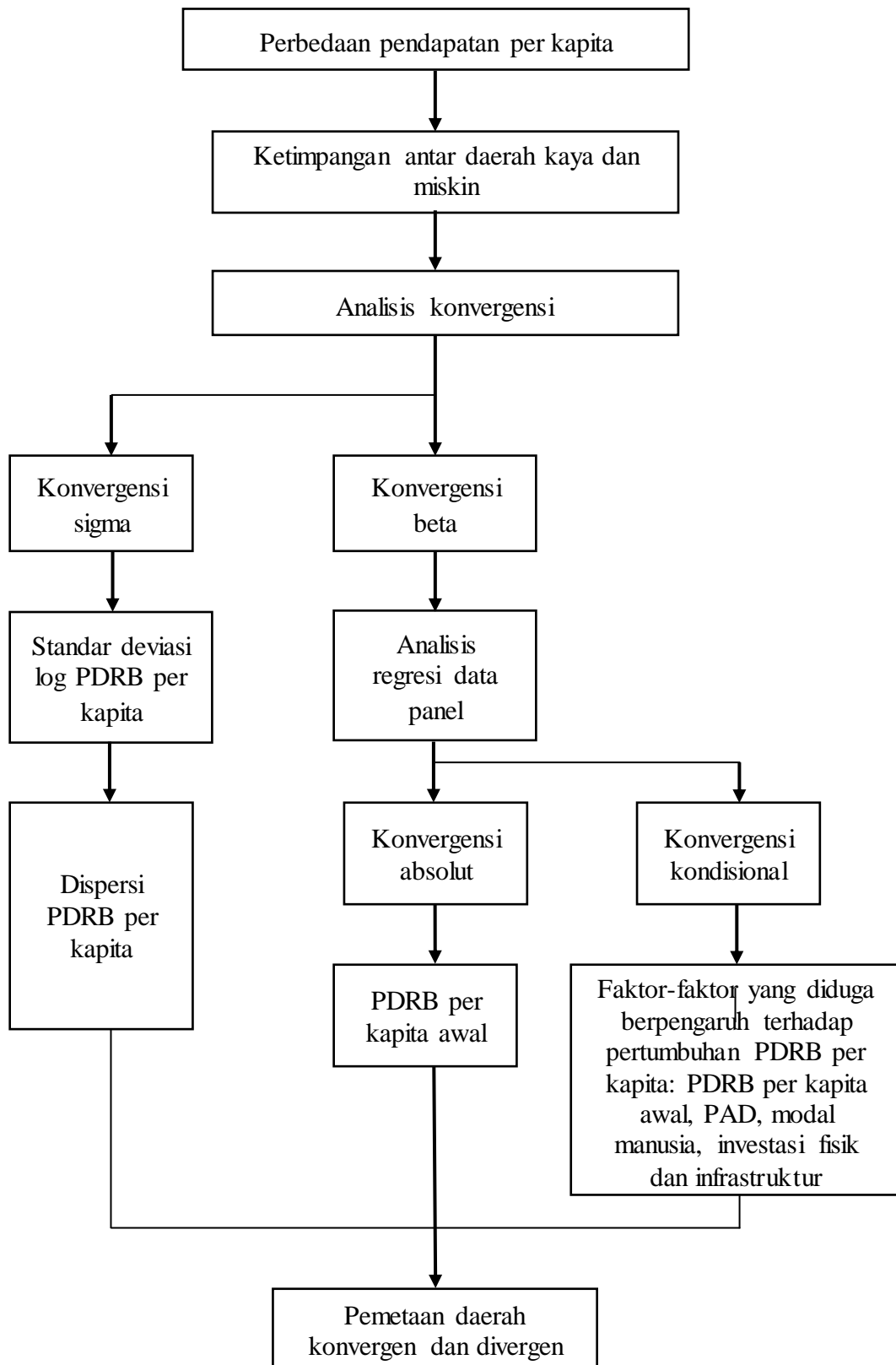
Peneliti pada penelitian sebelumnya melakukan penelitian di lokasi yang berbeda-beda, yaitu di dalam dan di luar Indonesia. beberapa peneliti juga melakukan penelitian dalam lingkup kecil yaitu pada cakupan wilayah atau daerah di luar Pulau Jawa. Berdasarkan tabel 2.1 juga terlihat bahwa penelitian konvergensi tingkat daerah yang dilakukan di Pulau Jawa bertempat di Provinsi Yogyakarta. Oleh karena itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada cakupan daerah dan tahun terbaru yang digunakan dalam penelitian.

2.4 Kerangka Berpikir

Perbedaan PDRB per kapita antar daerah merupakan fenomena yang umum dijumpai terutama di negara berkembang. Perbedaan PDRB per kapita pada suatu daerah akan berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta menimbulkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Karena pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, memperluas kesempatan kerja dan meratakan distribusi pendapatan. Belum meratanya distribusi PDRB per kapita antar daerah akan menimbulkan kelompok daerah kaya dan kelompok daerah miskin. Dimana daerah maju dengan PDRB per kapita yang tinggi hampir mencapai tahap *full employment*, sedangkan kelompok daerah miskin dan berkembang harus melakukan upaya lebih untuk bisa sampai pada tahap perekonomian daerah maju. Untuk menganalisis apakah kelompok daerah miskin dan berkembang tersebut dapat

mengejar ketertinggalan perekonomiannya dari daerah maju maka dilakukan analisis konvergensi.

Konvergensi diperlukan bagi kelompok daerah miskin maupun berkembang untuk menyetarakan pertumbuhan ekonomi mereka dengan daerah maju sehingga ketimpangan pendapatan antar daerah dapat diperkecil. Konvergensi dapat tercapai melalui pertumbuhan PDRB per kapita yang meningkat. Untuk mendorong terciptanya konvergensi tersebut diperlukan upaya yang tepat dengan menggunakan faktor-faktor lain yang perlu diidentifikasi untuk menimbulkan proses konvergensi. Analisis konvergensi ada dua, pertama yaitu konvergensi sigma yang dihitung menggunakan standar deviasi logaritma PDRB per kapita lalu dilihat dispersi (penyebaran) PDRB per kapita apakah menunjukkan hasil yang menurun atau sebaliknya. Apabila dispersi PDRB per kapita menurun artinya ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Tengah juga menurun, sedangkan apabila dispersi PDRB per kapita meningkat maka ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Tengah juga meningkat. Kedua yaitu konvergensi beta yang dihitung dengan menggunakan analisis regresi data panel dan menggunakan variabel dependen PDRB per kapita. Pengujian konvergensi beta ada dua yaitu konvergensi absolut dan konvergensi kondisional. Konvergensi absolut dihitung dengan memasukkan variabel PDRB per kapita awal sebagai satu-satunya variabel independen sedangkan konvergensi kondisional menambahkan beberapa variabel independen yang diduga mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita. Variabel independen tersebut antara lain PDRB per kapita awal, PAD, modal manusia, investasi fisik serta infrastruktur.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

2.5 Hipotesis Penelitian

Definisi hipotesis menurut Sekaran (2015) merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Lebih lanjut, hipotesis adalah dugaan awal mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta rumusan masalah maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terjadi konvergensi sigma PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2012-2017
2. Terjadi konvergensi beta absolut PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017
3. Terjadi konvergensi beta kondisional PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017
4. Pendaptan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita
5. Modal manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita
6. Investasi fisik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita
7. Infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi konvergensi sigma (*sigma convergence*) yang ditunjukkan dengan penurunan dispersi PDRB per kapita artinya adanya penurunan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2017
2. Tidak terjadi konvergensi absolut PDRB per kapita, sehingga daerah miskin tidak mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan daerah maju karena PDRB per kapita awal tidak menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan PDRB per kapita
3. Tidak terjadi konvergensi kondisional PDRB per kapita karena adanya variabel penelitian yang dimasukkan dalam perhitungan konvergensi kondisional juga tidak menunjukkan PDRB per kapita awal hubungan negatif dengan pertumbuhan PDRB per kapita. Jadi perekonomian kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2012-2017 mengalami proses divergensi
4. Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Jawa Tengah tahun 2012-2017. Diduga karena kabupaten/kota di Jawa Tengah masih bergantung pada dana perimbangan dari pusat

5. Modal manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 0.167202
6. Investasi fisik memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Investasi fisik memiliki pengaruh paling besar terhadap pertumbuhan PDRB per kapita dibandingkan variabel lainnya, yaitu sebesar 0.241167
7. Infrastruktur juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita yaitu sebesar 0.007865

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya ketimpangan pendapatan antar daerah di Jawa Tengah selama tahun 2012-2017 merupakan capaian yang perlu diapresiasi dan ditahankan sehingga bersama membangun perekonomian yang lebih mapan serta dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Jawa Tengah
2. Pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus dan bantuan kepada daerah-daerah yang mengalami divergensi. Bantuan tersebut dapat berupa pemberian dana alokasi umum, namun disamping itu pemerintah daerah tidak dapat bergantung secara terus menerus dengan dana bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut harus digunakan semaksimal mungkin agar kedepannya mampu mengelola

perekonomian daerahnya tanpa bergantung bantuan dari pemerintah pusat.

3. Agar dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah, daerah berkembang yang mengalami kondisi divergensi dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB per kapitanya dengan cara mengoptimalkan sumberdaya manusianya, memaksimalkan penerimaan investasinya serta pembangunan infrastruktur yang lebih diperhatikan oleh pemerintah
4. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi yang tersedia di tiap daerahnya dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta menyebar luaskan informasi potensi wilayah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tidak bergantung pada dana perimbangan dari pusat.
5. Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan mengadakan sosialisasi pentingnya wajib belajar kepada masyarakat terutama di daerah yang masih memiliki rata-rata lama sekolah yang rendah serta biaya pendidikan yang lebih terjangkau, karena biaya pendidikan dirasa masih mahal apalagi pada jenjang perguruan tinggi. Oleh karena itu pemerintah provinsi perlu meningkatkan anggaran untuk pendidikan sebab APBD di Jawa Tengah hanya menganggarkan 2,9 persen untuk alokasi pendidikan.
6. Penambahan investasi fisik dalam barang modal berupa bangunan karena komponen bangunan dalam PMTB memberikan kontribusi yang

banyak terhadap PMTB. Serta mengusahakan masuknya dana investasi dari pemerintah pusat maupun luar negeri yang sebanyak-banyaknya dengan cara menawarkan program-program yang bisa dibiayai atau menarik untuk dibiayai sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya.

7. Pemerintah diharapkan memperhatikan kondisi jalan dengan pemeliharaan berkala sebagaimana diketahui bahwa jalan merupakan sarana transportasi masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian karena mobilitas barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh jalan darat sebagai penghubung antar daerah satu dengan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R., & Wahyunadi. (2015). Disparitas Dan Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi & Humaniora* 1(1), 13-23.
- Banendro, S. D. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2006-2012. *Sosial Dan Ekonomi*, 1-26.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy* 100(2), 223-251.
- BI. (2017). *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Tengah*. Jawa Tengah: Bank Indonesia.
- BPS. (2017). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2018). *Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Badan Pusat Statistik.
- Dekiawan, H. (2014). Analisis Konvergensi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Di Indonesia Dengan Pendekatan Data Panel Spasial Tahun 2000-2012. *Economics & Business Research*, 842-867.
- Emalia, Z. (2012). Analisis Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1-16.
- Fahmi, A. (2013). Pengaruh Infrastruktur Secara Spasial Terhadap Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 17-28.
- Gama, A. S. (2010). Disparitas Dan Konvergensi PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 38-48.
- Gujarati, D. N. (2015). *Dasar-dasar Ekonometrika: Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur. *Signifikan*, 41-66.
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Kharisma, B., & Saleh, S. (2013). Convergence Of Income Among Provinces In Indonesia 1984-2008: A Panel Data Apporach. *Journal of Indonesia Economy and Business* 28(2), 167-187.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah Dan Kebijakan*. STIM YPKN: Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIEM YPKN.
- Mankiw, N. G. (2004). *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Murib, D., & dkk. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, PDRB Terhadap PAD Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23-33.
- Nurhamidah, R., & Suhartini, A. M. (2014). Determinan Konvergensi Pendapatan Di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 71-90.
- Olarinde, M. O., & Yahaya, Z. A. (2018). African Growth Convergence: Role Of Institutions And Macroeconomic Policies. *International Journal Of Development Issues*, 346-371.
- Prasasti, D. (2006). Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 30 Provinsi Di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional Dan Konvergensi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 344-360.
- Prasetyo, P. E. (2011). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Purwandari, A. E. (2016). Pendekatan Model Panel Dinamis Dalam Kajian Konvergensi Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2014. 45-52.
- Putra, Z., & Jamal, A. (2017). Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi Di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 31-41.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu Ekonomi Makro*. Jakarta: PT. Media Edukasi.
- Schmitt, C., & Strake, P. (2011). Explaining Convergence Of OECD Welfare States: A Conditional Approach. *Journal Of European Social Policy*, 1-39.
- Sekaran, U. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sodik, J. (2006). Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Analisis Konvergensi Antar Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21-32.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tajerin, & dkk. (2013). Tedensi Proses Konvergensi Dan Penentu Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Utama Di Indonesia, 1985-2010. *Jurnal Sosek KP*, 167-183.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Triani, & Kuntari, Y. (2013). Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan PAD Periode 2007-2012 Di Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ekonomi*, 1-16.
- Wau, T. (2015). Konvergensi Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara. *Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 104-115.
- Wibisono, Y. (2003). Konvergensi Di Indonesia: Beberapa Temuan Awal Dan Implikasinya. *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 53-82.